

KONFLIK SURIAH: AKAR MASALAH DAN DAMPAKNYA

A.Muchaddam Fahham*

A.M. Kartaatmaja**

Abstract

Syrian conflict seemed to be an endless war, which has claimed more lives of civilians, causing thousand seeking refuge and children losing their parents. Since March 2011, a large number of houses, infrastructure, and public service are devastated. This article describes the cause of the conflict, the actors, and the impacts of the continuity of the civilian war to Syria and international community. The writers conclude that conflict was not caused by sectarian factors, but political and economic interests of opposition groups and their supporting countries. There were three major warring parties, namely President Bashar and his loyalists, Syrian opposition group, and the jihadists. While, the number of refugees has reached 2.4 million, 75% of them are women and children, and there are also 4 million internally displaced people.

Keywords: Syi'ah, Sunni, al-Qaeda, civil war, refugees

Abstrak

Meskipun telah berlangsung selama empat tahun, hingga saat ini, konflik Suriah belum tampak akan berakhir. Sejak Maret 2011 konflik ini telah menelan korban yang tidak sedikit, ribuan pengungsi, dan ribuan anak menjadi yatim akibat kehilangan orang tua mereka. Ribuan rumah, infrastruktur dan sarana publik hancur. Tulisan ini berupaya memahami akar persoalan yang menjadi penyebab konflik Suriah, siapa aktor kunci yang terlibat dalam konflik, dan dampak konflik itu bagi Suriah dan dunia internasional. Data-data tentang konflik Suriah dikumpulkan dari buku, jurnal, dan web. Data-data tersebut kemudian dikategorisasi, disistematiskan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sumber masalah atau penyebab lahirnya konflik Suriah bukanlah perbedaan mazhab keagamaan melainkan kepentingan politik dan ekonomi dari oposisi penentang Assad dan negara-negara pendukung oposisi, ada tiga aktor yang berperan dan terlibat dalam konflik, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, oposisi Suriah, dan kelompok Jihadis. Dampak konflik bagi Suriah jatuhnya korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013 jumlah korban meninggal sebanyak 150.000 jiwa. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 2.4 juta orang, ¾ di antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang. Bagi dunia internasional, konflik Suriah berdampak dalam penanganan pengungsi.

Kata Kunci: Syi'ah, Sunni, al-Qaeda, perang sipil, pengungsi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik di Suriah berawal dari sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Daraa.¹ Ketika itu Maret 2011, 15 pelajar berumur antara 9-15 tahun menulis slogan-slogan anti-pemerintah di tembok-tembok

kota.² Slogan-slogan itu berbunyi, "Rakyat menginginkan rezim turun."³ Anak-anak ini kemungkinan terinspirasi oleh pergolakan di Tunisia yang menyebabkan Presiden Zainal Abidin bin Ali turun pada 14 Januari 2011, dan pergolakan Mesir yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada 1

* Peneliti Muda Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data (P3DI) Setjen DPR RI.

** Tenaga Ahli pada Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI.

¹ Stephen Starr, *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising* (London: C Hurst & Co, 2012), hlm. 3.

² Dina Y. Sulaeman, *Praha Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional* (Depok: IMA N, 2013) hlm. 100.

³ Siti Muti'ah, "Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?" dalam *Jurnal CMES Volume V Nomor 1*, Edisi Juli - Desember 2012 hlm. 5.

Februari 2011. Melihat aksi 15 pelajar itu, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib, sepupu Presiden Bashir al Assad menangkap dan memanjarkan anak-anak ini. Akibatnya, lahirlah gelombang protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut. Reaksi tentara terhadap protes itu berlebihan, mereka menambaki para pemrotes dan mengakibatkan 4 orang meninggal. Reaksi itu tidak meredakan protes, sebaliknya protes semakin meluas dari Deraa menuju kota-kota pinggiran Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur.⁴

Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi perang sipil yang dahsyat.⁵ Perang ini tidak saja menggunakan senjata konvensional sebagaimana layaknya yang digunakan dalam perang, tapi juga menggunakan senjata kimia.⁶

Ada pandangan yang menyatakan bahwa perang yang saat ini terjadi Suriah adalah perang antara mazhab Syi'ah yang diwakili oleh Bashar al-Assad dan para penentangannya yang bermazhab Sunni. Pandangan ini dibangun atas fakta yang terjadi di Suriah: ada dua kekuatan besar yang sedang bertarung, yakni Arab Saudi yang bermazhab Sunni dan Iran bermazhab Syi'ah.⁷ Fakta lainnya adalah bahwa pemerintahan Assad didukung oleh Iran dan gerakan Hizbullah, Iran merupakan negara yang bermazhab Syi'ah dan Hizbollah adalah gerakan berhaluan Syi'ah yang bermarkas di Lebanon. Sebaliknya para penentang Assad mendapat dukungan negara-negara yang bermazhab Sunni seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Afghanistan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Merdeka.com, "Mereka mau hancurkan Suriah, bukan sekadar tumbangkan Assad," 24 September 2013.

⁶ BBC Indonesia, "AS pastikan Suriah gunakan senjata kimia," 28 Agustus 2013, Namun pemerintah Suriah menolak bahwa mereka memiliki senjata kimia, lihat merdeka.com, "Mereka mau hancurkan Suriah, bukan sekadar tumbangkan Assad," 24 September 2013.

⁷ Anna Sunik dari Institut GIGA di Hamberg menyatakan bahwa sejak revolusi Islam di Iran 1979 Saudi memang ingin membendung pengaruh Iran, Lihat www.dw.de, "Kepentingan Arab Saudi dalam Perang Suriah," 24 Januari 2014.

Dengan merujuk peta konflik yang terjadi di Suriah, pertanyaan menarik yang perlu diajukan adalah apakah benar konflik di Suriah kemudian bisa dikatakan sebagai konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan teologis? Terlalu sederhana untuk menyatakan bahwa konflik tersebut merupakan konflik teologis, meskipun asumsi tersebut juga tidak bisa diabaikan sama sekali. Sebuah konflik terjadi tidak disebabkan oleh satu sebab tunggal. Konflik selalu lahir oleh sebab yang kompleks dan diliputi oleh banyak faktor dan kepentingan. Isu agama biasanya merupakan salah satu faktor pemicu di antara faktor-faktor yang lahir sebagai penyebab konflik.⁸

Atas dasar pandangan ini, dapat dimengerti kemudian, jika para analis konflik Suriah menyatakan bahwa konflik tersebut bukan konflik perbedaan teologis, antara Sunni versus Syi'ah.⁹ Dalam sebuah wawancara dengan jaringan AS Fox News, Rabu 18 September 2013, Bashar al-Assad bahkan menyebut konflik yang terjadi di Suriah bukan "perang saudara" melainkan telah diserang oleh puluhan ribu pejuang jihad asing yang bersekutu dengan al-Qaeda.¹⁰ Jika bukan konflik agama dan juga bukan konflik saudara, lalu apa penyebab lahirnya konflik di Suriah, siapa saja pihak yang terlibat dan memainkan peran kunci dalam konflik tersebut dan apa dampaknya bagi rakyat Suriah dan dunia internasional.

B. Permasalahan

Seperti telah disebutkan di akhir pendahuluan di atas, bahwa masalah utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah: apa penyebab lahirnya konflik di Suriah?, siapa saja pihak yang terlibat dan memainkan peran kunci dalam konflik tersebut, serta apa dampak

⁸ Menurut Michel Meyer, konflik Suriah lebih disebabkan oleh persaingan ekonomi daripada perbedaan mazhab keagamaan. Secara ekonomi Suriah merupakan negara penting bagi Iran dan Arab Saudi. Suriah memiliki akses langsung ke Laut Tengah, posisi demikian sangat penting bagi Iran dan Hizbullah. Lihat www.dw.de, "Kepentingan Arab Saudi dalam Perang Suriah," 24 Januari 2014.

⁹ Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah*, hlm. xi.

¹⁰ www.antarane.ws, "Bashar: Suriah bukan perang saudara, tetapi diserang al-Qaida," 19 September 2013.

konflik tersebut bagi rakyat Suriah dan dunia internasional. Atas dasar tiga masalah tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk memahami tiga masalah tersebut. Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan informasi tentang penyebab konflik, aktor kunci dalam konflik, dampak konflik bagi rakyat Suriah dan dunia internasional.

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan. Data-datanya berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang tersebar dalam buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital. Data-data yang berasal dari sumber kepustakaan tersebut kemudian dipilah dalam klaster-klaster sesuai dengan tujuan kajian. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan cara reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan acapkali bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik lahir karena ketidakseimbangan hubungan-hubungan antarpribadi, tingkat kelompok, organisasi, baik dalam bentuk hubungan sosial, ekonomi dan kekuasaan; kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah, seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan.¹¹

Penyebab lahirnya setiap peristiwa konflik tidak pernah tunggal, tetapi selalu beragam. Itulah mengapa konflik seringkali tidak mudah untuk diselesaikan. Meskipun konflik yang tengah terjadi telah memakan banyak korban, baik yang tewas maupun yang kehilangan tempat tinggal dan yang mengungsi. Para pihak yang berkonflik, pada umumnya sulit untuk diselesaikan.

¹¹ Simon Fisher dkk., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, alih bahasa S.N. Kartikasari dkk., dari edisi asli *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), hlm. 4.

Kesulitan penyelesaian konflik mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan pengelolaan konflik. Di antara pendekatan itu adalah pencegahan konflik,¹² penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik¹³, dan transformasi konflik.¹⁴

Dalam mengelola konflik diperlukan adanya seperangkat pengetahuan teoritis yang dapat digunakan untuk memahami penyebab lahirnya sebuah konflik. Di antara pengetahuan teoritis tentang konflik adalah teori hubungan masyarakat, negosiasi prinsip, kebutuhan manusia, identitas, kesalah pahaman antarbudaya, dan transformasi konflik. Dari berbagai teori ini, kita dapat memilih mana yang paling sesuai dan yang mungkin digunakan untuk mengelola konflik.¹⁵

Di samping teori-teori di atas, konflik pun dapat dipahami dengan alat bantu analisis konflik, yakni suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang.¹⁶ Dalam ungkapan lain disebutkan analisis konflik adalah kajian sistematis terhadap profil, sebab-sebab, aktor, dan dinamika konflik.¹⁷

Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik sederhana, praktis dan sesuai. Terdapat beragam keuntungan yang diperoleh jika kita menggunakan alat bantu analisis konflik, di antaranya, (1) untuk memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-kejadian saat ini; (2) untuk mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat, tidak hanya kelompok yang menonjol saja; untuk

¹² Pencegahan konflik mengacu pada strategi-strategi untuk mengatasi konflik laten dengan harapan dapat mencegah meningkatnya kekerasan.

¹³ Resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan, tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.

¹⁴ Transformasi konflik adalah strategi yang paling menyeluruh dan luas, yang juga merupakan strategi yang membutuhkan komitmen yang paling lama dan paling luas cakupannya.

¹⁵ Simon Fisher dkk., *Mengelola Konflik*, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁷ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), "Conflict Analysis," hlm. 2.

memahami pandangan semua kelompok yang lebih mengetahui bagaimana hubungannya satu sama lain; (3) untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari konflik.¹⁸

Ada sembilan alat bantu analisis konflik, yakni, penahapan konflik, urutan kejadian, pemetaan konflik, segitiga SPK (Sikap, Perilaku dan Konteks), Analogi bawang bombay, pohon konflik, analisis kekuatan konflik, analogi pilar dan piramida.¹⁹

Sementara Louis Kriesberg dalam Sri Yanuarti dkk²⁰ membedakan empat hal utama dalam analisis konflik, yakni: (1) isu yang dikonflikkan; (2) karakteristik dari kelompok-kelompok yang berkonflik; (3) hubungan antara kelompok-kelompok yang berkonflik; (4) cara yang digunakan oleh masing-masing kelompok dalam berkonflik.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengelola konflik yang tengah berlangsung di Suriah, sebaliknya ia dimaksudkan untuk memahami konflik dari sisi isu penyebab konflik, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, dan dampak dari konflik tersebut bagi Suriah dan dunia internasional. Dari paparan tentang pendekatan, teori, dan analisis konflik di atas, tulisan ini memilih dua alat bantu dalam analisis konflik sebagai kerangka berpikir dalam memahami konflik Suriah. Kedua alat bantu analisis itu adalah analisis tahapan dan pemetaan konflik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Konflik

Untuk mengetahui sumber konflik Suriah kita perlu mengetahui kronologi konfliknya, karena pada runtutan peristiwa konflik itulah sejatinya tersimpan pengetahuan apa yang menjadi sebab lahirnya konflik di Suriah.

Konflik Suriah dapat dirunut dari peristiwa protes yang dilakukan oleh sekelompok pelajar

saat mereka menulis slogan-slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota.²¹ Slogan-slogan itu berbunyi, "Rakyat menginginkan rezim turun."²² Kepolisian pemerintah Suriah menangkap para pelajar itu kemudian memenjarakan mereka selama satu bulan. Selama dalam masa penahanan, para pelajar itu mengalami penyiksaan, hal itu diketahui setelah para pelajar itu dibebaskan.

Mengetahui penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tanggal 11 Maret 2011 masyarakat kemudian melakukan aksi demonstrasi yang digelar di Kota Barat-Daya Daraa yang memprotes penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pasukan keamanan berupaya membubarkan demonstrasi, namun para demonstran tak bergeming, sampai akhirnya pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah para demonstran.²³

Pada 23 Maret 2011, demonstrasi kembali melanda kota Daraa, pasukan keamanan kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan para demonstran, pada kasus ini 20 orang demonstran dikabarkan tewas. Menyusul insiden tersebut, Presiden Bashar al-Assad, mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi politik, termasuk menghapus pembatasan partai politik dan menghapus hukum darurat Suriah yang telah diterapkan selama 48 tahun. Namun pengumuman itu diabaikan oleh para tokoh oposisi Suriah.

Pada 25 Maret 2011, setelah salat Jum'at, unjuk rasa kembali mengemuka di kota-kota seluruh negeri. Pasukan keamanan kembali berupaya membubarkan aksi unjuk rasa itu, namun unjuk rasa terus berjalan bahkan bertambah intens.

Protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh oposisi Suriah mendapat perlawanan dari rakyat Suriah pro-pemerintah, perlawanan itu ditunjukkan dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di Kota Damaskus. Pada 29 Maret 2011 pemerintah Suriah mengumumkan

¹⁸ Simon Fisher dkk., *Mengelola Konflik*, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁰ Sri Yanuarti dkk., *Konflik di Maluku Tengah: penyebab, Karakteristik, Penyelesaian Jangka Panjang* (Jakarta: LIPI Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI/Program Isu, 2003), hlm. 4.

²¹ Dina Y. Sulaeman, *Praha Suriah*, hlm. 100.

²² Siti Muti'ah, "Pergolakan Panjang Suriah, hlm. 5.

²³ "Syrian-Civil-War," dalam www.britannica.com, diakses tanggal 1 Juli 2014.

pengunduran diri dari kabinet, hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi yang didengungkan oleh para demonstran. Satu hari setelah, pengumuman itu, Presiden Assad tampil untuk pertama kalinya di depan publik sejak kerusuhan melanda Suriah, dan menyampaikan pidato di hadapan dewan legislatif untuk meredam protes para demonstran dan mengklaim bahwa protes itu terjadi karena konspirasi yang dilakukan asing. Tetapi ia juga mengakui, bahwa beberapa kekhawatiran para demonstran memang patut diperhatikan. Assad menolak ajakan oposisi untuk melakukan percepatan reformasi dan mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan rencananya untuk memperkenalkan reformasi secara bertahap. Setelah pidato tersebut, media pemerintah Suriah mengumumkan bahwa Assad telah membentuk sebuah komisi untuk mempelajari kemungkinan pencabutan hukum darurat.

Demonstrasi telah terjadi secara sporadis di seluruh negeri, pemerintah Suriah terus menghubungkan kerusuhan kepada konspirasi asing dan ketegangan sektarian. Pemerintah membuat beberapa konsesi yang ditujukan kepada Muslim Suriah konservatif dan minoritas Kurdi. Pada 6 April 2011, pemerintah Suriah berusaha untuk menjawab keresahan Muslim konservatif dengan menutup satu-satunya kasino Suriah dan membatalkan hukum 2010 yang melarang guru perempuan mengenakan niqab, cadar yang menutupi wajah. Pemerintah juga mengumumkan bahwa Noruz, festival Tahun Baru yang di Rayakan oleh orang Kurdi sebagai hari libur nasional.

Namun demikian, protes terus berlanjut, dan menyebar ke kota lainnya, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan Suriah. Pada 8 April 2011, pasukan keamanan menembaki demonstran di beberapa kota Suriah, menewaskan sedikitnya 35 orang. Menyusul sebuah laporan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 200 orang. Muncullah kecaman internasional terhadap pemerintah Suriah. Sejumlah

organisasi pembela HAM dan para kepala negara menyerukan pemberhentian kekerasan.

Pasukan keamanan terus menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa di seluruh negeri, Assad menunjuk kabinet baru dan berjanji untuk melembagakan reformasi politik dan mencabut hukum darurat Suriah. Pada tanggal 19 April kabinet mencabut undang-undang darurat dan membubarkan Mahkamah Agung Keamanan Negara Suriah. Pengadilan yang khusus digunakan untuk mengadili pihak-pihak anti-pemerintah. Namun pemerintah Suriah juga mengambil tindakan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berupaya untuk meredam protes. Pemerintah Suriah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum melakukan demonstrasi. Menteri dalam negeri Suriah yang baru diangkat mendesak rakyat Suriah agar tidak melakukan demonstrasi dengan menyatakan bahwa pemerintah akan terus menganggap demonstrasi sebagai ancaman nasional.

Segera setelah hukum darurat, pemerintah Suriah meningkatkan penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Pada tanggal 22 April 2011 pasukan keamanan menembaki demonstran yang berkumpul setelah salat Jumat, menewaskan sekitar 75 orang, di tengah kecaman internasional yang dipicu oleh maraknya aksi pembunuhan, pemerintah Suriah melancarkan strategi baru untuk membungkam protes masyarakat dengan menyebarkan sejumlah besar pasukan yang dilengkapi dengan tank dan kendaraan lapis baja ke kota-kota Daraa, Baniyas, Homs, dan tiga lokasi yang dijadikan sebagai pusat anti-pemerintah. Di beberapa daerah di negeri ini, pemerintah memberlakukan pemadaman akses komunikasi, mematikan layanan telepon dan internet. Di Daraa, pasukan keamanan memotong pasokan air dan listrik.

Seiring dengan demonstrasi yang terus menyebar di Suriah, pemerintah meningkatkan perlawanan terhadap para pengunjuk rasa dengan kekuatan militer. Pada awal Mei,

protes anti-pemerintah telah mencapai Damaskus. Protes yang terjadi di pusat kota Damaskus ditangani dengan aksi kekerasan pasukan pemerintah Suriah juga mendirikan barikade keamanan di beberapa pinggiran kota Damaskus upaya untuk membatasi gerakan para demonstran. Menyusul insiden tersebut. Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi berupa pelarangan perjalanan dan pembekuan aset kepada sejumlah pejabat senior Suriah yang dianggap bertanggungjawab dalam penanganan demonstrasi. Selain itu, UE juga menerapkan embargo senjata untuk Suriah. Seiring dengan kekerasan yang terus terjadi. Suriah juga semakin terisolasi dari sekutu regionalnya. Pada bulan Mei, Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Beberapa minggu kemudian, Turki memberikan dukungan untuk pihak demonstran dengan mengadakan sebuah konferensi bagi para anggota oposisi Suriah.

Pada tanggal 6 Juni Kantor berita Suriah melaporkan bahwa 120 tentara Suriah disergap dan dibunuh oleh sekelompok orang bersenjata di kota utara Jisr al-Shugur. Masyarakat setempat menyangsikan kebenaran berita tersebut dengan menyatakan bahwa tentara Suriah dibunuh oleh pasukan pemerintah karena menolak untuk menembaki demonstran. Menanggapi insiden tersebut pihak militer Suriah meluncurkan serangan yang berat menyebabkan ribuan warga melarikan diri dan melintasi perbatasan Turki. Rezim Assad terus menggunakan kekerasan terhadap para pengunjung rasa di bulan Juli dan Agustus, serta meluncurkan serangan militer terhadap sejumlah Kota termasuk Hammah dan Latakia. Pertumpahan darah terus menuai kecaman internasional yang menyerukan Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

Pada awal November 2011, pejabat Suriah menyetujui inisiatif Liga Arab yang menyerukan pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap para demonstran menarik mundur tank dan kendaraan lapis baja dari kota-kota, dan membebaskan para tahanan

politik. Beberapa pihak menilai persetujuan pemerintah Suriah sebagai taktik untuk mengulur waktu. Satu hari kemudian kekerasan kembali terjadi di kota Homs.

Di bawah tekanan internasional, pemerintah Suriah pada bulan Desember mengizinkan kunjungan delegasi Liga Arab untuk memantau proses implementasi dari strategi tersebut. Meskipun kekerasan terus terjadi, penilaian yang diberikan oleh tim pemantau cenderung positif sehingga menuai kritik dari kelompok HAM dan oposisi Suriah. Pada pertengahan Januari 2012, kredibilitas delegasi yang telah mengundurkan diri mengklaim bahwa pasukan pemerintah Suriah telah memberikan laporan palsu dari rekaman video yang direkayasa. Setelah beberapa negara Arab menarik anggota tim mereka dari posisi sebagai observer Liga Arab secara resmi menengguhkan keberlanjutan misi pemantau pada 28 Januari dengan alasan kekerasan.

Setelah kegagalan misi pemantau dari Liga Arab kekerasan terus meningkat. Pada awal Februari 2012, tentara Suriah melancarkan serangan kota Homs dengan membombardir wilayah yang dikuasai oposisi selama beberapa minggu. Pada bulan yang sama, Liga Arab dan PBB bersama-sama menunjuk Koffi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai utusan perdamaian untuk Suriah. Upaya Annan untuk penghentian kekerasan sebagaimana dihadapi Liga Arab pada tahun 2011, digagalkan oleh keengganan rezim Suriah untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Gencatan senjata yang disuarakan oleh PBB berhasil mengurangi angka kekerasan pada pertengahan April. Namun gencatan senjata hanya bertahan selama beberapa hari sebelum konflik antara pasukan pemerintah dan oposisi kembali terjadi. PBB menghentikan operasi pemantauan pada bulan Juni atas alasan keamanan. Akibat peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi selama musim panas 2012, Annan mengundurkan diri pada bulan Agustus dan digantikan oleh diplomat Aljazir, Lakhdar Brahimi.

Pada awal 2012, pengamat internasional dan anggota oposisi menganggap bahwa Dewan Nasional Suriah yang berbasis di Istanbul masih terlalu lemah untuk dapat mewakili kelompok oposisi Suriah. Pada bulan November, pemimpin oposisi Suriah mengumumkan pembentukan koalisi baru yang disebut Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Kekuatan Militer Oposisi Koalisi Nasional Suriah. Dalam satu bulan koalisi mendapat pangakuan dari berbagai negara sebagai wakil sah rakyat Suriah. Dalam satu bulan berikutnya, sejumlah negara mengakui Koalisi Nasional Suriah sebagai pihak yang secara efektif dapat mewakili kelompok oposisi.

Pada akhir tahun 2012, situasi militer tampaknya sudah mendekati jalan buntu. Pejuang pemberontak menguasai wilayah utara Suriah namun menghadapi kesulitan dalam penyediaan peralatan, persenjataan, dan aspek organisasi. Sementara itu, pasukan pemerintah juga semakin lemah akibat sejumlah aparat yang berbalik memihak oposisi. Pertempuran masih berlanjut setiap hari di wilayah yang diperebutkan, menyebabkan semakin tingginya korban tawan dari masyarakat sipil.

Dengan minimnya perkembangan yang terjadi di Suriah, negara-negara sekutu yang memihak pemerintah Suriah dan pemberontak sama-sama meningkatkan dukungan mereka yang menyebabkan meningkatnya kemungkinan perang sipil.²⁴ Upaya Turki, Arab Saudi, dan Qatar untuk mendanai dan mempersenjatai pihak pemberontak semakin terlihat pada akhir 2012 dan awal 2013, sementara pemerintah Suriah terus menerima senjata dari Iran dan kelompok militan Libanon, Hizbullah. Akhir tahun 2012, Hizbullah juga mulai mengirim para pejuangnya sendiri ke wilayah Suriah untuk melawan para pemberontak.

Babak baru yang memungkinkan penggunaan aksi militer internasional di wilayah Suriah semakin menguat setelah adanya dugaan

²⁴ Dalam sebuah wawancara, Assad sendiri menolak untuk menyebut perang di negaranya sebagai perang sipil atau perang saudara. Menurutnya perang yang terjadi di Suriah adalah perang yang diciptakan oleh suatu kekuatan dari luar untuk menghancurkan Suriah.

penggunaan senjata kimia di pinggiran kota Damaskus oleh rezim Assad yang menewaskan ratusan orang pada 21 Agustus 2013. Kelompok oposisi Suriah mengklaim bahwa pasukan pro-Assad telah melakukan serangan tersebut. Pejabat Suriah menyangkal penggunaan senjata kimia dan menegaskan bahwa apabila senjata kimia dipergunakan dalam serangan maka kesalahan berada pada pasukan pemberontak. Utusan PBB menemukan bukti senjata kimia di beberapa lokasi di Suriah. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis mengecam penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad dan berencana untuk melakukan aksi militer. Assad juga menyatakan untuk melawan apa yang ia sebut sebagai agresi Barat.

Kemungkinan terjadinya intervensi militer di Suriah mulai memudar pada akhir Agustus. Sebagian besar masyarakat Amerika dan Inggris menentang rencana aksi militer. Upaya Inggris untuk melakukan serangan militer Suriah digagalkan oleh Perlemen pada tanggal 29 Agustus. Voting yang diadakan di Kongres Amerika juga diundur, pada tanggal 10 September. Sementara itu, jalur diplomasi semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak yang menghasilkan kesepakatan antara Rusia, Suriah dan Amerika Serikat pada tanggal 14 September untuk menempatkan semua senjata kimia yang dimiliki Suriah dibawah kontrol internasional.²⁵

B. Sumber Konflik

Ada beragam pandangan yang bisa dikemukakan terkait masalah yang menjadi sumber utama konflik Suriah. *Pertama*, masalah sosial, ekonomi dan politik di dalam negeri yang dihadapi oleh Suriah. Masalah-masalah itu antara lain berupa tingginya jumlah pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya kesempatan untuk mobilitas sosial, pembatasan kebebasan politik, dan aparat keamanan yang represif.

Kedua, tuntutan sebagian penduduk Suriah agar dilakukan reformasi dan penggantian

²⁵ "Syrian-Civil-War," dalam www.britannica.com, diakses tanggal 1 Juli 2014

rezim Bashar al-Assad. Sejak tahun 1963, pemerintahan Suriah didominasi oleh Partai Baath, kemudian keluarga al-Assad, yakni Hafidz al-Assad yang memerintah sejak tahun 1970 hingga kematiannya di tahun 2000, dan digantikan oleh putranya, yakni Bashar al-Assad dan memerintah sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Selama empat puluh tahun di bawah pemerintahan klan Assad (Hafez al-Assad dan anaknya Bashar al-Assad) pembangunan sosial dan ekonomi Suriah masih jauh dari memuaskan. Suriah tergolong dalam negara berkembang berpendapatan menengah. Perekonomiannya ditopang terutama oleh minyak dan pertanian, sejak 2004 Suriah dikenai sanksi ekonomi oleh AS yang melarang atau membatasi ekspor-impor ke Suriah.²⁶

Dalam situasi seperti ini, sangat wajar bila muncul demo anti pemerintah dan keinginan perubahan rezim. Klan Assad memang telah berkuasa terlalu lama sehingga wajar ada kejenuhan politik. Pada Maret 2011, seiring dengan gelombang pemberontakan di negara-negara Arab, seperti Mesir dan Tunisia, aksi demo terjadi di Suriah. Para pengunjung rasa menuntut reformasi, mundurnya Presiden Bashar al-Assad, dibukanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berbicara, dan perbaikan ekonomi. Aksi demo tersebut ditanggapi oleh pemerintah Suriah telah memberikan beberapa konsep dan memenuhi sebagaimana tuntutan rakyat.

Seperti telah disebutkan, pada tanggal 21 April, pemerintah Suriah secara resmi mengumumkan pencabutan undang-undang darurat yang telah diberlakukan sejak 1963 dengan alasan negara sedang dalam kondisi darurat karena berhadapan dengan ancaman Israel dan kelompok-kelompok militan. Undang-undang darurat itu dianggap melanggar HAM karena memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk melarang pertemuan politik dan menangkapi orang-orang yang dicurigai membahayakan kestabilan negara. Namun semua upaya negosiasi yang dilakukan Assad diabaikan oleh pihak oposisi karena tuntutan

utama mereka adalah mundurnya Assad, seperti yang terjadi di Mesir, Tunisia, dan Libya.

Namun pandangan bahwa faktor penyebab konflik Suriah adalah tuntutan penggantian rezim Bashar al-Asaad sebagai dampak dari Arab spring ditolak oleh aktivis kemanusiaan MER-C Joserizal Jurnalis. Menurutnya,²⁷ jika tuntutan penggantian rezim merupakan faktor penyebab konflik dan peperangan di Suriah mengapa hal yang sama tidak terjadi di Qatar dan Arab Saudi, kedua negara itu menurutnya tidak lebih demokratis dibandingkan dengan Suriah. Tapi mengapa Arab spring yang menuntut demokratisasi justru terjadi di Suriah setelah sebelumnya terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya.

Dalam pandangan Joserizal, tuntutan demokrasi di Suriah adalah pemicu konflik dan peperangan, bukan faktor utama penyebab konflik dan peperangan itu sendiri. Pandangan Jose ada benarnya terutama jika dikaitkan pada aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Pada awalnya yang berhadapan dalam konflik Suriah adalah antara regim Bashar al-Asaad dengan pihak oposisi, namun dalam perkembangannya, konflik itu justru meluas eskalasinya, akibat masuknya berbagai pejuang jihad seperti al-Qaida ke Suriah. Dalam pandangan Jose ada dua faktor menjadi penyebab peperangan di Suriah tak kunjung selesai sampai sekarang. Kedua faktor itu adalah *pertama*, Suriah adalah negara yang kuat secara militer dan inteljen. *Kedua* Suriah selalu menunjukkan sikap perlawanan dengan Israel. Kondisi Suriah yang demikian membuat negara-negara seperti Israel, Amerika Serikat, NATO, Qatar, Arab Saudi dan Turki memberikan dukungannya kepada oposisi yang sedang berjuang menumbangkan Assad. Konflik dan peperangan di Suriah dengan demikian lebih disebabkan oleh faktor kepentingan negara-negara di sekeliling Suriah, yakni Qatar, Arab Saudi, dan Israel.

Ketiga, faktor lain yang kerap kali dirujuk untuk menunjuk penyebab konflik di Suriah

²⁶ Dina Y Sulaeman, *Prahara Suriah*, hlm. 24.

²⁷ www.voa-islam.com, "Diskusi terbuka: inilah pandangan Joserizal tentang konflik Suriah." 27 Juni 2013.

adalah dominasi minoritas Syi'ah Alawiyah atas politik Suriah. Dominasi itu di samping melahirkan diskriminasi terhadap mazhab Sunni dan pembatasan gerakan kelompok Ikhawanul Muslimin, juga melahirkan penguasaan elit Syi'ah Alawiyah atas berbagai sektor perekonomian di Suriah.²⁸ Faktor ini juga acap dirujuk untuk menyebut konflik dan peperangan di Suriah sebagai konflik dan peperangan antarpaham keagamaan dalam Islam. Suriah dipimpin oleh Bashar al-Asaad yang bermazhab Syi'ah Alawiyah, sementara pihak penentang Asaad berasal dari mazhab Islam Sunni. Rezim Assad disokong oleh Iran dan Hizbullah yang bermazhab Syi'ah, sebaliknya penentang Asaad didukung oleh Qatar, Saudi Arabia, Turki, al-Qaeda, Jabhat al-Nusro yang bermazhab Sunni.

Faktor perbedaan mazhab keagamaan sebagai penyebab konflik Suriah juga di tolak oleh Dina Y Sulaeman, menurutnya faktor mazhab dalam konflik Suriah adalah pemicu konflik bukan penyebab utama. Alasannya karena konflik di Suriah melibatkan banyak aktor, bukan hanya oposisi penentang Assad yang bermazhab Sunni, tetapi juga melibatkan pemimpin-pemimpin negara seperti Amerika, Perancis, dan Inggris. Keterlibatan berbagai pihak itu dalam konflik di Suriah membuat konflik yang terjadi sejak 11 Maret 2011 itu tak kunjung terlihat mereda. Korban yang tercatat dari sejak konflik hingga April 2013 sudah mencapai 92.900-100.000 jiwa.

Dengan mengutip Hinnebusch, Dina Y. Sulaeman juga menyatakan bahwa rezim Assad bukan rezim yang dibangun atas ideologi agama dan ajaran Syi'ah Alawy sebagai basisnya. Rezim Assad adalah rezim "otoriterian yang populis". Pemerintahan Assad menghadapi ancaman dari luar (Israel) dan ketidakstabilan internal sehingga memilih bersikap otoriter demi terciptanya kestabilan negara. Namun pada saat yang sama, Assad berusaha membangun negara dengan mengupayakan dukungan dari masyarakat kelas menengah dan

bawah. Assad sangat peduli dengan pentingnya dukungan yang muncul dari hati rakyat, bukan kepatuhan yang muncul dari rasa takut kepada rezim. Kebijakan pemerintahannya sangat populis dengan memberikan layanan kesehatan gratis dan sekolah gratis hingga universitas. Rezim Assad tidak hanya berisi orang-orang Alawy, bahkan Assad sebenarnya menolak untuk menjadi pemimpin kaum Alawy dengan cara mengangkat orang-orang di luar Alawy menjadi tokoh-tokoh penting di pemerintahan dan militer. Tokoh-tokoh di luar Alawy terlihat pada komposisi pimpinan militer misalnya 43% Sunni dan 37% Alawy, sedangkan komposisi menteri 58% Sunni dan 20% Alawy, sisinya diisi oleh Druze, Ismaili, dan Kristen.²⁹

Jika demikian, apa sejatinya sumber utama konflik Suriah? Mengacu pada penjelasan singkat di atas, hemat penulis sumber masalah konflik Suriah sangat kompleks, ada masalah-masalah domestik seperti sosial, ekonomi, dan politik, ada kepentingan bisnis gas negara-negara lain di Suriah, dan ada juga masalah sentimen sektarian antarmazhab. Kesemua masalah itu berjaln-kelindan dan rumit untuk diurai mana di antara masalah itu yang dominan sebagai penyebab utama konflik yang berkepanjangan itu. Jika disederhanakan sumber konflik Suriah dapat dipilah menjadi dua, *pertama*, berasal dari dalam negeri, yakni masalah sosial, ekonomi, dan politik dalam berupa tingginya pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya mobilitas sosial, merajalelanya korupsi, tidak adanya kebebasan politik, represifnya aparat keamanan.³⁰ *Kedua*, berasal dari luar negeri, berupa kepentingan politik dan ekonomi. Turki misalnya berambisi untuk menjadi pemain utama di Timur Tengah karena itu negara ini ikut campur dalam konflik Suriah. Qatar dan Arab Saudi takut akan Iran yang membantu Suriah, Israel juga berkepentingan terhadap jatuhnya pemerintahan Assad karena selama ini Suriah bersekutu dengan Iran, Hamas, dan Hizbullah

²⁸ Muhammad Fakhry Ghafur, "Membaca Konflik Suriah," dalam www.politik.lipi.go.id, 31 Agustus 2012.

²⁹ Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah*, hlm. 20-21.

³⁰ Jeremy M. Sharp and Christopher M. Blanchard, "Armed Conflict in Syria: Background and U.S. Response," *Congressional Research and Service*, September 6, 2013, p. 6.

dalam menentang Israel. Suriah bahkan negara yang sangat keras menentang Israel. Sementara negara-negara Barat berkepentingan terhadap gas bumi di Suriah.³¹

C. Aktor yang Terlibat dalam Konflik

Kita dapat menyederhanakan aktor yang memainkan peran penting dalam konflik Suriah dalam tiga kelompok, pertama, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, kedua, oposisi Suriah, dan ketiga, kelompok Jihadis. Ketiga kelompok ini masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Presiden Assad berupaya mempertahankan negara dan pemerintahannya, sementara pihak oposisi berupaya merebut kekuasaan Assad, sedangkan kelompok jihadis, berupaya merebut kekuasaan dan negara Suriah dengan mendeklarasikan khilafah, yakni Islamic State Iraq and Sham (ISIS).

1. Presiden Bashar al-Assad dan Pendukungnya

Presiden Bashar al-Assad mulai menduduki jabatan Presiden Suriah tahun 2000, ia menggantikan posisi ayahnya. Di awal masa kekuasaannya, ia memposisikan dirinya sebagai seorang reformis. Namun kritik tajam meluncur ketika masyarakat tidak merasakan perubahan yang signifikan. Protes keras terhadap rezim Assad muncul pada maret 2011 yang menyebabkan terjadinya perang sipil hingga saat ini. Rezim Assad didukung oleh minoritas Alawi, Druze, dan Ismaili, banyak kaum Kristen yang mendukung Assad karena kebijakan sekulernya.

Iran, Rusia dan China adalah negara yang mendukung rezim Assad, selain didukung oleh negara tersebut, rezim Assad juga memperoleh dukungan dari kelompok Hizbullah Lebanon. Pemimpin Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa kelompok militan Syi'ah yang dipimpinnya tidak akan tinggal diam ketika kelompok aliansinya di Damaskus mengalami penyerangan. Syaikh Hassan Nasrallah bahkan menyatakan bahwa anggota Hizbullah berperang di Suriah melawan kelompok

ekstremis Islam yang membahayakan Libanon, dan bersumpah bahwa kelompoknya tidak akan mengizinkan militan Suriah untuk mengambil alih wilayah yang berbatasan dengan Libanon. Suriah bersama dengan Iran, telah menjadi pendukung utama Hizbullah. Diyakini bahwa ribuan roket yang dimiliki oleh kelompok tersebut berasal dari Suriah.

2. Oposisi Suriah

Ada dua kelompok oposisi yang menentang dan melakukan pemberontakan kepada rezim Assad, yakni:

Pertama, kelompok pemberontak Suriah antara lain Free Syrian Army (FSA), Syrian National Council (SNC) dan Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF) yang dibentuk atas inisiatif Amerika di Doha, Qatar koalisi ini terdiri dari 60 anggota yang berasal dari 22 mantan anggota SNC, perwakilan dari masing-masing kota besar Suriah, dan sejumlah tokoh pemberontak Suriah yang berada di luar negeri. Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya telah mengakui koalisi tersebut sebagai wakil masyarakat Suriah. (Kanada belum memberikan keputusan). Presiden SNCORF terpilih adalah Moaz al-Khatib dari kalangan Ikhwanul Muslimin, sementara Perdana Menteri Ghassan Hitto pengusaha asal Suriah keturunan Kurdi, yang telah selama 30 tahun terakhir menjadi AS. Namun SNCORF kemudian pecah dan al-Khatib dan beberapa anggota SNCORF mengundurkan diri. Pada Juli 2013, pemberontak veteran Ahmad Jarba dinobatkan sebagai presiden Koalisi pada Juli 2013. Jarba merupakan anggota etnis mayoritas yang berasal dari Suriah bagian Timur. Jarba diyakini memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi.³² *Kedua*, Kelompok Oposisi anti-kekerasan, antisektarianisme, dan anti-intervensi asing; mereka tergabung dalam koalisi yang bernama National Coordination Body for Democratic Change.

3. Kelompok Jihadis

Kelompok jihadis merupakan kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaida. Pada awalnya kelompok ini membantu oposisi Suriah dalam

³¹ Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah*, hlm. 95-149.

³² *Ibid.*

melakukan pemberontakan terhadap rezim Assad, namun dalam perkembangannya mereka tidak lagi membantu para oposisi tetapi memiliki agenda tersendiri untuk membentuk khilafah. Di antara kelompok jihadis tersebut adalah Jabha al-Nusrah, Ahrar al-Sham kataeb, Liwa' al-Tauhid, Ahrar Souria, Halab al-Shahba, al-Harakah al-Fajr al-Islamiyah, Dar al-Ummah, Liwa Jaish Muhammad, Liwa' al-Nasr, Liwa' Dar al-Islam dan lain-lain;

Kelompok Jihadis menyatakan bertanggungjawab dalam sejumlah aksi bom bunuh diri yang ditargetkan terhadap pemerintah Suriah selama terjadinya perang sipil di negara tersebut. Pada Desember 2012, Amerika Serikat menyatakan kelompok jihad Jabhat al-Nusra sebagai kelompok teroris. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah keterlibatan kaum ekstremis dalam grup oposisi Suriah. Pemimpin Al-Nusra menyatakan kesetiaannya terhadap kelompok Al-Qaida pada musim semi 2013. Namun kelompok tersebut telah menolak untuk bergabung dengan kelompok Al-Qaida lainnya, yaitu *the Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), yang telah melebarkan operasinya ke wilayah Suriah. (Al-Qaeda menghentikan hubungan dengan ISIS pada Februari 2014) Kelompok-kelompok tersebut telah terlibat peperangan antara satu dengan lainnya, termasuk dengan FSA, yang mengindikasikan adanya perpecahan dalam gerakan oposisi.

D. Dampak Konflik

Menurut data yang diperoleh per 1 April 2014, sekitar 6,5 juta warga Suriah sudah meninggalkan kediaman mereka akibat konflik berkepanjangan.³³ Sejak Maret 2011, sebanyak 2,7 juta warga Suriah – atau sekitar 10 persen dari total populasi di negara tersebut – sudah mengungsi ke negara-negara tetangganya.³⁴ Pada akhir tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah

³³ Chris Huber dan Kathryn Reid. *FAQs: War in Syria, children, and the refugee crisis*. April 7, 2014. World Vision U.S. <http://www.worldvision.org/news-stories-videos/faqs-war-syria-children-and-refugee-crisis>.

³⁴ Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud, dan Mary Beth D. Nikitin. *Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response*. 5 Mei 2014. U.S. Congressional Research Service.

diperkirakan akan mencapai 4,1 juta jiwa.³⁵ Menurut UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*), hal tersebut menambah beban bantuan organisasi internasional yang harus mengeluarkan dana 12,9 Milyar USD untuk membantu 52 juta jiwa yang rentan terhadap konflik di 17 lokasi krisis di berbagai belahan dunia.³⁶ Hampir setengah dari dana bantuan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi dampak konflik Suriah.³⁷

Pada November 2013, *Oxford Research Group* melaporkan bahwa setidaknya 11 ribu anak-anak Suriah telah terbunuh akibat konflik. Informasi tersebut diperoleh melalui data PBB dan empat kelompok pembela HAM (Hak Asasi Manusia) di Suriah.³⁸ Sumber lainnya menyatakan bahwa jumlah korban telah menyentuh angka 100,000 jiwa.³⁹ Sejak September 2013, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) telah menetapkan sedikitnya 2 juta warga Suriah sebagai pengungsi di empat negara tetangganya, yaitu Yordania, Irak, Libanon, dan Turki.⁴⁰ Ratusan ribu lainnya tinggal di luar wilayah tersebut tanpa akses terhadap bantuan internasional.

Dampak konflik Suriah sudah mencapai tahap yang semakin mengkhawatirkan, bukan saja bagi warga Suriah yang terpaksa mengungsi, tetapi juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri di negara-negara tetangganya. Sebanyak 21 kamp pengungsian telah didirikan di wilayah Turki di bawah wewenang *Prime Ministry Disaster & Emergency Management Presidency* (AFAD).⁴¹

³⁵ AFP. U.N.: *Syrian refugees to nearly double by end 2014*. Geneva. 16 December 2013.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Al-Jazeera. *Report: Over 11,000 Syrian Children Killed in War, Most by Explosives*. 24 November 2013.

³⁹ Al-Jazeera. *UN: Syria death toll rises above 100,000*. 25 Juli 2013. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/2013725142157450141.html>.

⁴⁰ UN Agency. *Number of Syrian refugees tops 2 million, with 'more on the way'*. 3 September 2013. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45757#.U0yVMicayK0>.

⁴¹ Osman Bahadır Dinçer, Vittoria Federici, Elizabeth Ferris, Sema Karaca, Kemal Kirişçi, dan Elif Özmenek Çarmıklı. *Turkey and Syrian Refugees: The Limits of Hospitality*. International Strategic Research Organization (USAK). 1 November 2013.

Secara umum, kondisi kamp pengungsian di Turki relatif stabil, namun beberapa kamp juga sempat melancarkan aksi protes akibat ketidaksediaan air bersih dan buruknya kondisi sanitasi.

Di satu sisi, para pengungsi berupaya untuk menuntut hak mereka terhadap kehidupan yang layak, namun di sisi lain, negara penerima juga kerap mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Walaupun sejumlah organisasi internasional, termasuk UNHCR, turut terlibat secara langsung dalam menangani pengungsi, perlu diakui pula bahwa ada *cost* yang dikeluarkan oleh negara penerima⁴² karena mereka dituntut untuk mengerahkan sumber daya tertentu dalam mengimplementasikan langkah-langkah kemanusiaan yang diperlukan.

Dalam tiga tahun terakhir (2011 – Maret 2014), sekitar 200 ribu warga Suriah telah mengungsi ke wilayah Kurdistan (Irak).⁴³ Diantara para pengungsi tersebut juga merupakan warga Irak yang mengungsi ke Suriah untuk menghindari dampak invasi Amerika Serikat pada 2003 lalu. Konflik yang terjadi di Suriah ini telah menambah daftar panjang warga Irak yang kehilangan tempat tinggal di negaranya hingga mencapai 2,8 juta jiwa.⁴⁴

Sejumlah kamp pengungsian yang berada di negara tersebut sudah mengalami kelebihan populasi. Warga setempat juga turut merasakan dampaknya dan menjadi beban bagi pemerintah. Salah satu kekhawatiran yang timbul adalah kemungkinan bahwa sejumlah pengungsi Suriah bergabung dengan milisi Kurdi dan terlibat konflik dengan ekstremis di wilayah perbatasan Suriah-Irak. Akibat lemahnya dokumentasi legal terhadap identifikasi warga pengungsi, sejumlah anak dan wanita semakin rentan terhadap resiko eksploitasi dan penyelundupan

manusia. Diperkirakan bahwa pada akhir tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah di Irak akan mencapai 400 ribu jiwa.⁴⁵

Di samping itu, kamp pengungsian warga Suriah di wilayah Yordania juga akan segera bertambah seiring dengan peningkatan laju pengungsi yang mencapai 600 jiwa setiap harinya. Sampai dengan bulan April 2014, dua kamp pengungsian yang berada di Yordania, Zaatari dan Azraq, masing-masing menampung 100.000 dan 130.000 jiwa. Yordania menampung tidak kurang dari 585.000 pengungsi Suriah.⁴⁶ Yordania bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Internasional mengenai pengungsi, namun pemerintah Yordania terus bekerjasama dengan organisasi internasional untuk menangani krisis kemanusiaan yang tengah terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa Yordania tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, dan sangat bergantung pada bantuan internasional.⁴⁷ Diperkirakan bahwa setengah populasi Yordania merupakan pengungsi asal Palestina.⁴⁸ Walaupun asumsi tersebut masih dapat diperdebatkan dan cenderung dipolitisir, Yordania memiliki perbandingan jumlah pengungsi dan penduduk asli yang tertinggi di dunia.⁴⁹

Libanon juga merupakan tujuan utama bagi para pengungsi yang berasal dari Irak dan Palestina. Menurut data bulan April 2014, jumlah pengungsi Suriah di Libanon yang tercatat oleh UNHCR sudah mencapai satu juta jiwa.⁵⁰ Pada

⁴² Refworld. *The role of host countries: the cost and impact of hosting refugees*. Executive Committee of the High Commissioner's Programme Standing Committee 51st meeting. 31 Mei 2011.

⁴³ *Finding a new home*. <http://www.dw.de/finding-a-new-home/g-17482440>.

⁴⁴ Andrew Edward Tchic. *The shame of it all: The wave of refugees flooding the Middle East*. Journal of Turkish Weekly (JTW). Ankara, Turkey. 27 Februari 2014. International Strategic Research Organization.

⁴⁵ UNHCR. *2014 Syria Regional Response Plan - Iraq*. <http://www.unhcr.org/syriarrp6/docs/syria-rrp6-iraq-response-plan.pdf>.

⁴⁶ Patrick Maigua. *New refugee camp in Jordan as more Syrian refugees flee conflict*. United Nations, Geneva. <http://www.unmultimedia.org/radio/english/2014/03/new-refugee-camp-in-jordan-as-more-syrian-refugees-flee-conflict-and-violence/#.U0yayScaySM>.

⁴⁷ Tchic, *Op.cit.*

⁴⁸ IRIN. *Analysis: Palestinian refugees from Syria feel abandoned*. Humanitarian News and Analysis. <http://www.irinnews.org/report/96202/analysis-palestinian-refugees-from-syria-feel-abandoned>.

⁴⁹ Geraldine Chatelard. *Jordan: A Refugee Haven*. Migration Policy Institute. 2010.

⁵⁰ Al-Jazeera. *Syrian refugees hit million mark in Lebanon*. 3 April 2014. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/syrian-refugees-hit-million-mark-lebanon-201443792523131.html>.

akhir tahun 2014, jumlah pengungsi di wilayah ini diperkirakan dapat mencapai 1,5 juta jiwa, tidak termasuk 450 ribu pengungsi asal Palestina yang terdaftar oleh UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*). Sekitar 10 persen populasi Libanon merupakan warga Palestina⁵¹ dan setengah diantaranya hidup di 12 kamp pengungsian di tengah maraknya kemiskinan, kelebihan populasi, buruknya kondisi tempat tinggal, dan kurangnya infrastruktur. Sebanyak 18 persen anak jalanan di Libanon berasal dari Palestina.⁵²

Selama tiga tahun terakhir, instabilitas politik dan krisis Suriah telah memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Libanon yang sebelumnya relatif stabil. Walaupun tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Libanon telah menandatangani berbagai perjanjian HAM internasional yang krusial bagi upaya perlindungan pengungsi. Namun demikian, isu penegakan hukum dan praktek administrasi masih menjadi permasalahan dan menghambat proses pemenuhan kebutuhan para pengungsi dan pencari suaka.

Arus pengungsi Suriah tidak saja mengalir ke negara-negara tetangga terdekatnya, melainkan sudah terdeteksi ke negara-negara lainnya. Kementerian Dalam Negeri Aljazair memperkirakan sekitar 12 ribu warga Suriah telah mengungsi ke negara tersebut.⁵³ Pada tahun 2012, sedikitnya 1.000 pencari suaka dari Suriah juga tiba di Eropa setiap bulannya.⁵⁴ Senada dengan hal tersebut, *Refugees International* juga melaporkan bahwa pengungsi Suriah bahkan

sudah mencapai Bulgaria (kurang lebih 5.000 jiwa), Maldives, dan Thailand.⁵⁵

Fokus perhatian dunia internasional terhadap pengungsi semakin meningkat sejak merebaknya fenomena “Arab Spring” tahun 2010 lalu. Namun demikian perlu dipahami pula bahwa isu pengungsi memberi dampak yang luar biasa besar bagi negara penerima dan negara transit, serta mempengaruhi stabilitas sistem internasional. Negara-negara tetangga Suriah (Irak, Turki, Yordania, dan Libanon), terkecuali Israel, telah terpengaruh oleh peningkatan arus pengungsi. Di Libanon khususnya, timbul kekhawatiran jangka panjang terhadap stabilitas domestik.⁵⁶ Isu pengungsi dengan demikian, bukan hanya merupakan isu kemanusiaan, tetapi sudah tereskalasi ke dalam ranah politik.⁵⁷ Pertumbuhan populasi dalam jumlah signifikan yang tidak diiringi dengan peningkatan produktifitas juga dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas domestik suatu negara.

United Nation High Commission for Refugees (UNHCR) mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena konflik atau peperangan.⁵⁸ Dari sudut pandang demografis, pengungsi dapat dikategorikan sebagai pengungsi dewasa, pengungsi anak-anak, dan pengungsi lanjut usia. Pengungsian bisa terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada perkembangan kondisi di tempat asalnya. Walaupun tidak berada dalam wilayah yurisdiksi negara asalnya, para pengungsi tetap memiliki hak-hak sebagaimana yang melekat dan di atur dalam *UN Declaration on Human Rights* dan *Artikel 12-30 dari Refugee Convention*, termasuk hak untuk beragama, hak untuk memiliki harta

⁵¹ Simon Haddad. *The Palestinian Predicament in Lebanon*. Middle East Quarterly. September 2000, pp. 29-40.

⁵² Refworld. *Lebanon: Treatment of Palestinian refugees, including information on identity documents, mobility rights, property rights, access to social services, education and employment, and living conditions*. 15 November 2011. Immigration and Refugee Board of Canada. <http://www.refworld.org/docid/507553bd2.html>.

⁵³ *Morocco and Algeria trade accusations over deporting refugees*. 29 Januari 2014. <https://www.middleeastmonitor.com/news/africa/9496-morocco-and-algeria-trade-accusations-over-deporting-refugees>.

⁵⁴ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. *Briefing: The Mounting Syrian Refugee Crisis*. 20 Agustus 2012. <http://www.irinnews.org/report/96136/briefing-the-mounting-syrian-refugee-crisis>.

⁵⁵ Michael Boyce. *Beyond Emergency Assistance: Syrian Refugees in Northern Iraq and Jordan*. Februari 2014. Refugees international. <https://data.unhcr.org/syrian-refugees/download.php?id=4335>.

⁵⁶ UNHCR. *2014 UNHCR country operations profile – Lebanon*. <http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html>.

⁵⁷ Missy Ryan. *Syria refugee crisis poses major threat to Lebanese stability: U.N.* 27 Maret 2014. Reuters. <http://www.reuters.com/article/2014/03/28/us-lebanon-usa-idUSBREA2R02E20140328>.

⁵⁸ Definisi “pengungsi” menurut UNHCR. http://www.unrefugees.org/site/c.lfIQKSOWFqG/b.4950731/k.A894/What_is_a_refugee.htm.

benda, hak untuk meminta dan menerima bantuan kemanusiaan, hak untuk berpindah tempat, dan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.⁵⁹

Pengungsi sebagaimana manusia lainnya juga memiliki kebutuhan dasar untuk dapat terlibat dalam lingkungan sosialnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi: rasa aman, kasih sayang, kesempatan untuk mencapai cita-cita, dan diterima oleh masyarakat.⁶⁰ Keamanan sosial individu merupakan bagian tak terpisahkan dari aspek pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat tercapai apabila seorang individu memiliki pendapatan yang layak dan stabil, jaminan kesehatan, gizi baik, tempat tinggal yang layak, akses untuk memperoleh pendidikan, ketersediaan air bersih dan sanitasi.

UNOCHA dalam *Guiding Principles on Internal Displacement* Pasal 15 menyebutkan bahwa “internally displaced persons” (IDP) memiliki hak untuk: 1) mencari keselamatan di wilayah lain; 2) meninggalkan negaranya; 3) mencari/meminta suaka di negara lain; dan 4) dilindungi dari pemaksaan untuk kembali ke negaranya atau untuk ditempatkan di suatu area dimana kehidupan, kebebasan, keamanan, dan kesehatannya terancam.

Pasal ke 22 lebih lanjut menyebutkan bahwa IDP, baik yang tinggal di dalam maupun di luar penampungan, memiliki hak yang bersifat non-diskriminatif untuk: 1) mengemukakan pendapat dan menjalankan agamanya; 2) memperoleh kesempatan kerja dan terlibat dalam aktifitas ekonomi; 3) berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat; 4) memilih dan terlibat dalam aktifitas publik; dan 5) berkomunikasi dalam bahasa yang dimengerti. Selain hak-hak tersebut, UNOCHA dalam pasal ke 23 juga menyerukan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi anak-anak dan kaum perempuan IDP. Pasal ke 25 menjelaskan bahwa negara setempat memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun demikian, organisasi humaniter internasional

juga memiliki hak untuk menawarkan bantuan kemanusiaan.⁶¹

Dalam jangka panjang, instabilitas sosial dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bagi para pengungsi dapat menimbulkan dampak sosial-psikologis, termasuk gangguan mental seperti depresi, trauma, dan keinginan untuk bunuh diri. Pengungsi anak-anak lebih rentan terhadap kondisi yang ada di penampungan, bahkan dalam jangka pendek. Permasalahan yang sering timbul pada anak adalah: gangguan perkembangan dan pertumbuhan, gangguan tidur, depresi, dan berkurangnya kemampuan akademik.⁶² Padahal seiring dengan berkembangnya konflik Suriah, jumlah pengungsi anak telah mencapai setengah dari jumlah pengungsi Suriah, atau lebih dari 1 juta jiwa.⁶³ Mereka tinggal di kamp pengungsian dan banyak diantaranya sudah kehilangan anggota keluarga.

Dalam jangka panjang, aksi kekerasan yang dipertontonkan selama konflik di Suriah dapat merusak kesehatan mental individu dan menghambat perkembangan psikologisnya.⁶⁴ Implikasi negatif tersebut akan lebih berdampak pada anak. Dalam kasus konflik Suriah, anak-anak tidak bisa mengandalkan orang tua mereka untuk mendapatkan perlindungan karena banyak diantara mereka yang anggota keluarganya tewas dalam konflik. Mereka juga tidak dapat memperoleh perlindungan dari institusi yang berwenang karena runtuhnya sistem pemerintahan yang ada. Selain menyebabkan warganya kehilangan tempat tinggal, konflik Suriah juga menyebabkan hancurnya sistem pendidikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketidakstabilan emosi anak-anak karena hilangnya kesempatan

⁵⁹ *The Refugee Convention 1951*. <http://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>.

⁶⁰ Elizabeth Nicholds. *A Primer of Sosial Case Work*. 1965. New York, Columbia University Press.

⁶¹ UNOCHA *Guiding Principles on Internal Displacement*. 2001.

⁶² Janet Cleveland, Cécile Rousseau, dan Rachel Kronick. *The harmful effects of detention and family separation on asylum seekers' mental health in the context of Bill C-31*. April 2012. Brief submitted to the House of Commons Standing Committee on Citizenship and Immigration concerning Bill C-31, the Protecting Canada's Immigration System Act.

⁶³ Data UNHCR. <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.php>.

⁶⁴ Cecily Hilleary. *Syrian Conflict a Public Health Disaster*. VOA. http://www.voanews.com/content/syrian_conflict_a_public_health_disaster/1516710.html.

untuk turut ambil bagian dalam kegiatan sosial-masyarakat. Selain aspek pendidikan, tumbuh-kembang anak juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, termasuk kepercayaan diri, menerima kasih sayang, dan penerimaan masyarakat.

Kekerasan terhadap anak, di tambah dengan kurangnya faktor-faktor pendukung kesehatan dan tumbuh-kembang anak di lokasi-lokasi konflik dapat menyebabkan trauma yang mendorong timbulnya ketidakseimbangan mental. Anak-anak yang menjadi korban atau menyaksikan kekerasan lebih berpotensi untuk terlibat dalam aksi kriminal di kemudian hari.⁶⁵ Risiko dari konflik yang berkepanjangan adalah lahirnya generasi yang hidup dalam konflik, apatis, dan cenderung bersikap bermusuhan. Dalam jangka panjang, generasi yang lahir dari konflik dapat menimbulkan goncangan terhadap stabilitas sosial dan keamanan global serta menjadi beban bagi komunitas internasional.

Konflik itu sendiri juga merupakan bencana kemanusiaan. Penyerangan dan kekerasan seksual, termasuk terhadap anak, seringkali digunakan sebagai senjata psikologis. Pemaksaan dalam industri prostitusi juga dapat timbul sebagai efek samping dari konflik dan krisis yang berkepanjangan. Banyak anak-anak yang kehilangan keluarganya kemudian bergabung dengan milisi ataupun pemberontak bersenjata dan terlibat pula dalam peperangan, bukan sebagai target, melainkan sebagai *combatant*. Konflik dan peperangan melahirkan generasi muda yang terindoktrinasi dengan kekerasan dan dengan demikian, rentan terlibat dalam aksi-aksi terorisme.⁶⁶ Perang dan kemiskinan juga merupakan lingkaran setan dalam konflik yang berkepanjangan.⁶⁷ Terputusnya akses terhadap makanan dan ketersediaan air bersih dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi, masalah kesehatan, gangguan mental, dan kekerasan, terutama pada anak-anak.

⁶⁵ Eric H. Holder, Jr. dan Kathryn M. Turman. *Message from the Deputy Attorney General, Breaking the Cycle of Violence: Recommendations to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and Witnesses*. Juni 1999. U.S. Department of Justice.

⁶⁶ Peter W. Singer. *Children at War*. Artikel Brookings Institution. 2002. Amerika Serikat.

⁶⁷ The Economist. *The Economics of Violence*. 2011.

Dengan merujuk pada dampak di atas, perlindungan terhadap pengungsi merupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap mereka utamanya ditujukan pada beberapa hal, yaitu diantaranya: 1) melindungi perempuan dan anak-anak dari risiko konflik; 2) mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya ketika situasi sudah cukup kondusif atau menyediakan tempat tinggal baru apabila lokasi asalnya tidak memungkinkan untuk ditempati; dan 3) menganalisa akar permasalahan dan memberikan solusi permanen terhadap aksi kekerasan, konflik, dan peperangan.⁶⁸

Selain untuk memberikan perlindungan, fasilitas yang tersedia di pengungsian seharusnya ditujukan pula untuk dapat memberdayakan para pengungsi dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan asing. Beberapa aspek pemberdayaan pengungsi, meliputi: 1) pendidikan formal dan pendidikan informal untuk meningkatkan keterampilan pengungsi dan kemampuan untuk bertahan hidup; 2) akses terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan; dan 3) akses terhadap pemeliharaan kesehatan.⁶⁹ Untuk mewujudkan upaya pemberdayaan pengungsi, dibutuhkan keterlibatan para pembuat kebijakan dan dukungan masyarakat.

Salah satu upaya yang dipromosikan untuk dapat meningkatkan taraf hidup para pengungsi dan pencari suaka adalah dengan memberikan izin kerja dan akses terhadap pendidikan yang layak. Tanpa campur tangan organisasi internasional, pemberian izin kerja akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Terutama, apabila negara penerima merupakan negara berkembang yang juga menghadapi tantangan sosial-ekonomi domestik seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana halnya yang terjadi di Timur Tengah. Terlebih lagi, strategi tersebut hanya bersifat sementara. Hal yang lebih krusial

⁶⁸ Kate Jastram dan Marilyn Achiron. *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*. UNHCR dan IPU. http://www.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf.

⁶⁹ Sarah Meyer. *The 'refugee aid and development' approach in Uganda: empowerment and self-reliance of refugees in practice*. University of Oxford, United Kingdom. 2006.

pada dasarnya adalah relokasi pengungsi baik ke daerah asalnya maupun daerah lain secara permanen (*resettlement*). Melihat perkembangan situasi yang tengah terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika, arus pertambahan jumlah pengungsi tampaknya masih akan terus terjadi dan meningkatkan dinamika sistem internasional.

Arus pergerakan manusia sudah berlangsung sepanjang sejarah. Namun sampai saat ini, pembahasan mengenai aspek-aspek migrasi masih menjadi tantangan tersendiri bagi para analis yang tengah berupaya untuk membangun teori yang komprehensif yang dapat memberikan penjelasan dalam memandang dinamikanya. Isu migrasi internasional bersifat multi-dimensional, yaitu melibatkan pergerakan (perpindahan) manusia yang disebabkan oleh berbagai motivasi dan kekuatan penggerak. Setiap perpindahan manusia dalam era modern menimbulkan dampak dan konsekuensi masing-masing. Migrasi yang didasari oleh motif ekonomi dan dilakukan oleh para tenaga kerja terampil dan pelaku usaha, misalnya, tidak dipandang sebagai penyebab atau hasil dari situasi konflik. Dampak dari migrasi harus di analisa dalam konteksnya masing-masing, terutama yang berhubungan dengan peperangan, konflik, dan bencana alam.

Dalam era di mana situasi ekonomi politik dunia semakin kompleks, isu-isu mengenai migrasi juga semakin dinamis. Dalam setiap pergerakan manusia, ada interaksi dan implikasi yang berhubungan dengan faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya.⁷⁰ Ketika migrasi terjadi secara sukarela, maka implikasi negatif dari perpindahan manusia lebih dapat dihindari. Namun dalam kasus di mana migrasi terjadi secara terpaksa, proses interaksi yang terjadi tidaklah bersifat alamiah sehingga berpotensi untuk menimbulkan gejolak atau permasalahan

tertentu. Secara spesifik dalam memandang berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah, termasuk Suriah, jumlah pengungsi yang demikian besar, dapat mempengaruhi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, dalam upaya untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi, kita juga harus memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam peta ekonomi politik global.

Selama ini, pendekatan komunitas internasional dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi, lebih banyak difokuskan pada upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mengembalikan para pengungsi ke tempat (negara) asal mereka. Namun banyak di antara pengungsi yang walaupun sudah tidak berada dalam situasi gawat darurat, masih terjebak dalam situasi yang berkepanjangan, yang memaksa mereka untuk tetap menjadi pengungsi bahkan sampai puluhan tahun. Hal ini merupakan tantangan besar bagi upaya perlindungan pengungsi dan bagi stabilitas komunitas internasional.⁷¹

Bukan hanya negara tujuan dan negara asal pengungsi yang memerlukan perhatian internasional, tetapi juga negara-negara transit yang sering disalahgunakan sebagai perlintasan ilegal bagi para pengungsi. Arus pengungsi yang demikian besar bukan hanya menjadi beban bagi negara penerima yang tergolong sebagai negara berkembang, tetapi juga bagi negara maju seperti Australia. Selama dua tahun terakhir, Australia cenderung menutup diri terhadap dunia luar dengan kerap mempromosikan kebijakan "*sovereign border*" untuk menghentikan, bahkan menolak kedatangan pengungsi ke negaranya. Imbas dari kebijakan tersebut adalah berkurangnya pilihan bagi para pengungsi. Ribuan pengungsi asal Timur Tengah sudah mencoba memasuki wilayah Eropa. Sama halnya dengan Australia, negara-negara Eropa juga cenderung menutup pintu bagi para pengungsi. Pada tahun 2013,

⁷⁰ Sarah Collinson. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Globalization and the dynamics of international migration: implications for the refugee regime*, May 1999, ISSN 1020-7473, available at: <http://www.refworld.org/docid/4ff59b852.html> [accessed 20 June 2014].

⁷¹ Gil Loescher, James Milner, Edward Newman, dan Gary Troeller. *Protracted refugee situations and the regional dynamics of peacebuilding*. 2007. Taylor and Francis. pp 491-501.

700 orang tewas ketika mencoba untuk menyeberangi Laut Mediterania.⁷² Pada bulan Mei 2014, diperkirakan sekitar 500.000 orang tengah bersiap-siap untuk menyeberangi rute tersebut melalui Libya.⁷³ Pada bulan Oktober 2013, setidaknya 350 orang imigran tewas di perairan Italia.⁷⁴

Pada dasarnya, penolakan terhadap pengungsi di suatu negara hanya akan meningkatkan kerentanan dunia internasional terhadap instabilitas global. Ditutupnya akses bagi pengungsi akan meningkatkan resiko lain yang dikategorikan sebagai kejahatan trans-nasional seperti penyelundupan dan perdagangan manusia bahkan perbudakan, yang juga melibatkan anak-anak di bawah umur.

Pada tahun 2014, jumlah imigran ilegal yang memasuki Eropa cenderung mengalami peningkatan, mayoritas di antara mereka berasal dari Suriah.⁷⁵ Para pengungsi menggunakan jasa para penyelundup manusia dengan mengeluarkan biaya yang berkisar antara 6.000 hingga 16.000 USD untuk mencapai Eropa.⁷⁶ Untuk mengantar para pengungsi dari Istanbul ke Edirne, kota kecil di Turki yang lokasinya berdekatan dengan perbatasan Eropa, seorang penyelundup mengenakan biaya 400 Euro per orang.⁷⁷ Dari perbatasan, para pengungsi harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati kawasan hutan Bulgaria.

Persoalan baru pun muncul, bukan saja para pengungsi mengalami kesulitan dan kerugian materi, perjalanan untuk mendapatkan suaka ke negara tujuan juga mengancam keselamatan mereka. Negara tujuan (penerima) pun harus mengeluarkan upaya tertentu sebagai konsekuensi

akibat perubahan kebijakan di Australia. Banyak di antara mereka yang kemudian “terjebak” di negara transit – termasuk Indonesia – tanpa kepastian status. Dari sudut pandang ekonomi-politik, efektifitas dan efisiensi dari kebijakan penolakan pengungsi, juga menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut. Menimbang berbagai dampak global yang diakibatkan oleh isu pengungsi dan pencari suaka, perlu dicermati pula apakah pemberian insentif atau manfaat berimbang bagi negara penerima pengungsi dapat meredam implikasi negatif dari tidak terkendalinya arus pengungsi dan dapat pula mempertahankan stabilitas sistem internasional.

Indonesia, walaupun tidak berbatasan langsung dengan negara-negara di Timur Tengah, juga memiliki kepentingan terhadap sistem penanganan pengungsi dan pencari suaka yang adil dan sistematis. Sebagaimana halnya Yordania, Indonesia bukan merupakan negara pihak pada dalam *Refugee Convention* tahun 1951 dan 1967. Namun demikian, Indonesia pada dasarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut. Konvensi Pengungsi 1951 ditandatangani oleh sejumlah negara sebagai komitmen untuk menerima dan melindungi pengungsi dari berbagai negara yang terancam keselamatan jiwanya. Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara Eropa merupakan negara-negara pihak dalam konvensi tersebut. Kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi adalah membuka jalur kerjasama dengan IOM (*International Organization for Migration*) dan UNHCR.

Seiring dengan bertambahnya arus pengungsi dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, muncul tekanan terhadap bukan saja negara-negara tujuan pengungsi, tetapi juga negara-negara transit untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab yang lebih besar dalam penanganan pengungsi. Pada praktiknya, walaupun bukan merupakan negara pihak pada Konvensi 1951, Indonesia saat ini dinilai lalai dalam upaya perlindungan pengungsi dan seringkali menjadi sorotan internasional. Kritik tajam terhadap Indonesia dilontarkan oleh *Human Rights Watch*, yaitu bahwa

⁷² Charlotte MsDonald-Gibson. *Syria conflict: Hundreds more desperate refugees could die at sea as Europe does little to help*. 15 Mei 2014. The Independent.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Deborah Amos dan Rima Marrouch. *With The Help Of Smugglers, Syrian Refugees Sneak Into Europe*. Desember 2013. NPR.

⁷⁷ Daniel Trilling. *The road to nowhere: the Syrian refugees left out in the cold by Europe*. Januari 2014. <http://www.newstatesman.com/2014/01/road-to-nowhere-syria>.

Indonesia secara sistematis melalaikan upaya perlindungan pengungsi dan pencari suaka di bawah umur.⁷⁸ HRW bahkan melaporkan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Indonesia terhadap para pengungsi yang ditahan di pusat detensi. Walaupun diperlukan penyelidikan yang berimbang, perlu diakui bahwa hal tersebut semakin menambah daftar panjang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Kelebihan kapasitas dan prasarana yang tidak memadai merupakan tantangan utama yang dihadapi baik oleh para pengungsi maupun negara penerima (yang dalam kasus Indonesia merupakan negara transit). Sejak tahun 2008, telah terjadi 2.000 persen peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ditampung di Indonesia.⁷⁹ Dengan masih berlangsungnya konflik Suriah, bukan tidak mungkin bahwa jumlah tersebut akan semakin bertambah. Perlu diakui pula bahwa Indonesia sebagai negara berkembang, belum mampu mengatasi hal tersebut. Besarnya arus pengungsi Suriah ke negara-negara tetangganya juga akan menekan pengungsi dari negara lain, yang terpaksa kehilangan tempat tinggal akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah, untuk mencari tempat tinggal baru. Pertambahan jumlah pengungsi yang tidak disertai dengan upaya penanganan yang baik dapat menjadi bumerang bagi negara yang bersangkutan. Aspek kesenjangan sosial dan instabilitas ekonomi-politik menjadi taruhannya.

Tata kelola migrasi yang bersifat global dan homogen sangat sulit untuk ditemui, karena pada kenyataannya, dampak *forced migration* di setiap negara atau wilayah akan berbeda, tergantung pada skala krisis yang terjadi.⁸⁰

⁷⁸ Alice Farmer. *The impact of immigration detention on children*. September 2013. Forced Migration Review: Detention, alternatives to detention, and deportation. FMR44. <http://www.fmreview.org/>.

⁷⁹ Alice Farmer. *Confronting Refugee Abuse in Indonesia's Detention Centers*. 1 Juli 2013. Human Rights Watch. <http://m.hrw.org/news/2013/07/01/confronting-refugee-abuse-indonesia-s-detention-centers>.

⁸⁰ Alexander Betts dan Gil Loescher. *Refugees in International Relations*. Oxford University Press, 4 Nov 2010. pp 196-197.

Perbedaan kebijakan juga terjadi karena adanya perbedaan persepsi terhadap kualitas perlindungan pengungsi, termasuk penilaian subjektif terhadap sarana dan prasarana pendukungnya.

Penanganan IDP di negara-negara Afrika sebagai contoh, dinilai tidak efektif karena keengganan atau penyangkalan pemerintah setempat terhadap krisis yang sedang terjadi di negaranya serta adanya penolakan terhadap bantuan humaniter internasional untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Hal tersebut ditemukan dalam upaya penanganan IDP di Ethiopia, Zimbabwe, Sudan (Darfur), dan Somalia.⁸¹

Di kawasan Timur Tengah, hambatan terhadap penanganan IDP disebabkan oleh kurangnya kapasitas nasional, ketiadaan kemauan politik, dan faktor keamanan. Hambatan utama dalam upaya penyaluran bantuan humaniter adalah akses yang sangat terbatas dan ancaman yang diluncurkan pada pekerja humaniter. Situasi tersebut ditemukan di Irak dan Yaman.⁸² Liga Arab juga dinilai tidak efektif dalam mengupayakan penanganan dan perlindungan IDP yang selama bertahun-tahun hanya difokuskan pada konflik Palestina-Israel dan proses rekonstruksi Irak.

Di tingkat regional Asia, Afrika, dan Timur Tengah, upaya penanganan pengungsi dan IDP secara umum juga dipandang belum memadai. Perbedaan signifikan terjadi di kawasan Eropa, dimana Uni Eropa telah menyusun tata kelola sistem penanganan migrasi di tingkat eksekutif.⁸³ Sebagai salah satu upaya untuk menjembatani perbedaan kebijakan antar negara, khususnya dalam menangani IDP, organisasi internasional diberikan mandat untuk dapat menyalurkan bantuan humaniter yang diperlukan ke wilayah-wilayah yang dibutuhkan. Langkah ini dinilai lebih efektif karena organisasi internasional

⁸¹ *Ibid.*, p 197.

⁸² *Ibid.*, pp 197-198.

⁸³ Sebagai upaya untuk mempromosikan penanganan arus migrasi yang efisien dan pengembangan kebijakan bersama dalam isu pencari suaka dan imigrasi, *European Commission* membentuk *the Asylum, Migration and Integration Fund* (AMIF) yang diberlakukan pada periode 2012-2020.

tidak memiliki entitas kenegaraan. Dengan memberikan akses terhadap organisasi internasional, negara penerima bantuan tetap mempertahankan kedaulatannya.

Dari sudut pandang historis, pembentukan organisasi internasional untuk perlindungan pengungsi pada awalnya difokuskan untuk menangani pengungsi pasca perang Eropa dan era perang dingin. Karakteristik organisasi internasional pada masa itu cenderung Eropa-sentris. Bahkan UNHCR baru dapat dikategorikan sebagai organisasi dengan cakupan internasional pada paruh keempat abad ke-20.⁸⁴ Walaupun dengan mandat yang demikian besar, laporan evaluasi menunjukkan adanya perbedaan yang dilakukan oleh UNHCR dalam proses penentuan status pengungsi di negara-negara kawasan Timur Tengah. UNHCR juga dinilai bias dalam menangani IDP. Fokus utama UNHCR ditujukan pada daerah-daerah yang vital bagi hubungan Barat-Timur, dimana IDP dapat memperoleh bantuan yang layak.⁸⁵

Kembali pada sudut pandang politik internasional, peran negara dan sistem internasional dalam menangani masalah pengungsi masih diperdebatkan. Arendt dalam Franke (2009) menyatakan bahwa dalam diskursus hubungan internasional, negara-negara modern dan berdaulat tidak memandang isu pengungsi dan tuntutan mereka sebagai fenomena sosial yang normal, namun lebih dilandaskan pada tanggung jawab politik. Permasalahan pengungsi bukan merupakan isu etika internasional yang dibahas dalam hubungan internasional. Namun situasi yang menaunginya justru menjadi perhatian analisis hubungan internasional. Isu pengungsi dipergunakan untuk mendeskripsikan politik luar negeri suatu negara dan etika negara yang bersangkutan dalam pergaulan internasional.

Konsep pengungsi dalam ilmu hubungan internasional baru mulai berkembang pada akhir 1920 dan dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) melalui pembentukan LNHCR (*League of Nations High Commissioner for Refugees*). Selanjutnya

pada tahun 1950, PBB mendirikan UNHCR yang bertujuan untuk menangani dan membantu warga Eropa yang kehilangan tempat tinggal pasca Perang Dunia ke II. Namun seiring dengan berkembangnya situasi politik internasional, mandat tersebut terus diperpanjang. Faktanya, sejak pentingnya penyelesaian isu pengungsi diakui di dalam Konvensi Pengungsi 1951, jumlah pengungsi secara global terus bertambah. Saat ini, pengungsi dianggap sebagai hambatan bagi terciptanya masyarakat internasional yang teratur dan terorganisir.⁸⁶

Diskursus pengungsi dalam ilmu hubungan internasional menunjukkan bahwa pemikiran institusional memang diperlukan untuk memahami penyebab terjadinya keterpaksaan migrasi, implikasinya, serta kebijakan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, isu pengungsi bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi merupakan isu politik yang implikasinya pun bersifat multi dimensional.

Dalam evolusi teori hubungan internasional, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dapat di sebut sebagai pijakan menuju terciptanya kerangka institusional global yang didasarkan pada hukum internasional. Oran Young mendefinisikan institusi sebagai “praktik sosial yang dapat mengenali peran (dari berbagai aktor) yang terikat pada serangkaian aturan yang mengatur hubungan antaraktor”.⁸⁷ Institusi dapat melibatkan organisasi, yang dalam hal ini di pandang sebagai entitas fisik.

Permasalahan migrasi dan pengungsi tidak lagi hanya menjadi perhatian bagi Kementerian Tenaga Kerja dan imigrasi, tetapi sudah terakomodasi sebagai agenda *high international politics* yang melibatkan para kepala negara, jajaran kabinet, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan hubungan antar negara.⁸⁸ Dari sudut pandang konvensional,

⁸⁴ Loescher dalam Betts dan Loescher. 2010. p 199.

⁸⁵ Toft dalam Betts dan Loescher. 2010. p 199.

⁸⁶ Mark FN. Franke “*Political Exclusion of Refugees in the Ethics of International Relations*” di dalam Patrick Hayden “*The Ashgate Research Companion to Ethics and International Relations*”. Ashgate Publishing, Ltd., 2009.

⁸⁷ Oran Young. *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment*. Ithaca, NY. Cornell University Press. 1989. pp 32.

⁸⁸ Myron Weiner. *Security, Stability, and International Migration*. International Security 17 No. 3. 1992/1993). pp 91.

para peneliti hubungan internasional cenderung memfokuskan perhatian pada isu-isu keamanan nasional dan internasional tanpa menjabarkan kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan terjadinya situasi konflik. Namun demikian dalam memandang perkembangan konflik di Timur Tengah, termasuk Suriah, kita tidak dapat memisahkan situasi konflik yang terjadi saat ini dari aspek historis dan dampak konflik regional yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Kemunculan komunitas multi-etnis di berbagai belahan dunia, yang salah satunya diakibatkan oleh arus migrasi yang signifikan, dapat meningkatkan potensi konflik. Oleh karena itu, kebijakan politik global mengenai arus migrasi internasional dan upaya penanganannya akan menjadi salah satu keputusan penting dalam beberapa dekade mendatang.⁸⁹

Kembali pada konteks Suriah, Indonesia perlu memandang penting perkembangan konflik di Timur Tengah. Isu pengungsi yang sudah masuk ke dalam ranah politik internasional harus disikapi dengan tegas. Kritik internasional terhadap Indonesia dalam penanganan pengungsi sebaiknya ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai refleksi terhadap sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan imigrasi. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup manusia untuk mengantarkan para imigran ilegal dari Timur Tengah ke Australia melalui perairan nusantara, menjadikan wilayah Indonesia yang demikian luas, semakin rawan terhadap aktifitas kejahatan trans-nasional. Kebijakan "sovereign border" yang diimplementasikan Australia dan penolakan negara-negara Eropa terhadap kedatangan pengungsi sebaiknya juga dikritisi sebagai cela dalam upaya penegakan prinsip-prinsip HAM yang dilindungi oleh hukum internasional. Dengan memperhatikan

dampak kekerasan terhadap anak-anak, baik yang masih berada di lokasi konflik maupun di pengungsian, berlanjutnya konflik Suriah tidak dapat di pandang sebelah mata. Indonesia perlu menekankan bahwa pelanggaran HAM bukan saja telah dilakukan oleh rezim Assad terhadap warga negaranya, tetapi oleh negara-negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 yang menolak kedatangan pengungsi dan memperkeruh stabilitas sistem internasional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Akar masalah penyebab lahirnya konflik di Suriah bukanlah persoalan perbedaan mazhab keagamaan antara Bashar al-Assad yang bermazhab Syi'ah Alawiyah versus para oposisi yang bermazhab Sunni. Penyebab konflik juga bukan karena pemerintah Suriah tidak demokratis, seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya. Akar masalah yang menjadi penyebab konflik di Suriah adalah kepentingan politik dan ekonomi negara-negara pendukung oposisi yang menuntut penggantian rezim dan negara-negara yang mendukung Presiden al-Asaad. Tuntutan penggantian rezim dan pengunduran diri Presiden al-Assad merupakan pintu masuk lahirnya konflik dan perang di Suriah. Ada tiga aktor utama yang terlibat dalam konflik di Suriah, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, oposisi Suriah, dan Jihadis. Dampaknya bagi Suriah adalah jatuhnya korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013 jumlah korban meninggal sebanyak 150.000 jiwa. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 2.4 juta orang, 3/4 di antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang. Bagi dunia internasional, konflik Suriah berdampak dalam penanganan pengungsi.

B. Saran

Sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitas internasional, negara-negara

⁸⁹ Douglas S. Massey et al., "Theories of International Migration: A Review and Appraisal". *Population and Development Review* 19, no. 3 (1993): 463. di dalam Christer Jönsson and Jonas Tallberg. *Institutional Theory in International Relations*. <https://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IIR.pdf>.

anggota PBB yang bukan merupakan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, atas nama kemanusiaan, selayaknya mendukung upaya perlindungan terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Setiap negara selayaknya memiliki sistem penanganan pengungsi yang akuntabel serta didukung oleh aparaturnya keamanan dan petugas imigrasi yang handal dan profesional, yang memahami prinsip-prinsip perlindungan HAM. Aspek pendidikan dan *capacity building* dalam demokrasi dan HAM merupakan hal yang krusial bagi elit pemerintah dan pelaksanaannya. Pelanggaran HAM memiliki konsekuensi yang sangat serius, baik bagi pelaku maupun sistem yang menaunginya.

Perlu ada insentif khusus, terutama dalam bentuk kebijakan internasional baik bagi negara transit maupun negara penerima pengungsi. Pertambahan populasi yang signifikan bukanlah merupakan hal yang mudah untuk ditangani, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Ada aspek sosial-psikologis dan ekonomi-politik yang harus diperhatikan. Tidak terkendalinya kedatangan pengungsi dapat menyebabkan negara penerima atau negara penampung semakin rentan terhadap instabilitas.

Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 harus dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Konvensi tersebut dan menghormati komitmen yang telah mereka ikrarkan terhadap upaya perlindungan pengungsi. Perlu ada kepastian dan kejelasan dalam upaya *resettlement* bagi para pengungsi yang secara langsung melibatkan para negara pihak Konvensi 1951.

Negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi harus menyadari perlunya dukungan terhadap negara-negara transit dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang layak sehubungan dengan upaya perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Sikap apatis hanya akan mencederai hubungan antar negara dan meningkatkan risiko instabilitas keamanan global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander Betts dan Gil Loescher. 2010. *Refugees in International Relations*. Oxford University Press.
- Dina Y. Sulaeman, 2013. *Praha Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Depok: IMA N.
- Elizabeth Nicholds, 1965. *A Primer of Social Case Work*, New York: Columbia University Press.
- Eric H. Holder, Jr. dan Kathryn M. Turman. 1999, *Message from the Deputy Attorney General, Breaking the Cycle of Violence: Recommendations to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and Witnesses*, U.S. Department of Justice.
- Geraldine Chatelard. 2010. *Jordan: A Refugee Haven*. Migration Policy Institute.
- Oran Young, 1989. *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment*. Ithaca New York: Cornell University Press.
- Patrick Hayden, 2009. *The Ashgate Research Companion to Ethics and International Relations*, Ashgate Publishing.
- Simon Fisher dkk., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, alih bahasa S.N. Kartikasari dkk., dari edisi asli *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), hlm. 4
- Stephen Starr, 2012. *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*, London: C Hurst & Co.
- Sri Yanuarti dkk., 2003. *Konflik di Maluku Tengah: penyebab, Karakteristik, Penyelesaian Jangka Panjang*, Jakarta: LIPI Press.

Jurnal

- Andrew Edward Tchier, "The shame of it all: The wave of refugees flooding the Middle East," *Journal of Turkish Weekly (JTW)*. Ankara, Turkey. 27 Februari 2014. International Strategic Research Organization.
- Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud, dan Mary Beth D. Nikitin. "Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response". U.S. Congressional Research Service, May 5 2014.
- Jeremy M. Sharp and Christopher M. Blanchard, "Armed Conflict in Syria: Background and U.S. Response," Congressional Research and Service, September 6, 2013.
- Osman Bahadır Dinger, Vittoria Federici, Elizabeth Ferris, Sema Karaca, Kemal Kirişçi, dan Elif Özmenek Çarmıklı. "Turkey and Syrian Refugees: The Limits of Hospitality". International Strategic Research Organization (USAK). 1 November 2013.
- Myron Weiner, "Security, Stability, and International Migration". *International Security* 17 No. 3. 1992/1993.
- Peter W. Singer. "Children at War". Artikel Brookings Institution, Amerika Serikat, 2002.
- Refworld. "The role of host countries: the cost and impact of hosting refugees". Executive Committee of the High Commissioner's Programme Standing Committee 51st meeting. 31 Mei 2011.
- Simon Haddad. "The Palestinian Predicament in Lebanon." *Middle East Quarterly*. September 2000.
- Siti Muti'ah, "Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?" dalam *Jurnal CMES Volume V Nomor 1*, Edisi Juli - Desember 2012.
- The Economist. *The Economics of Violence*. 2011.

Internet

- AFP, "UN: Syrian refugees to Nearly Double by End 2014," Geneva, 16 December 2013
- Alice Farmer, "The impact of Immigration Detention on Children," dalam *Forced Migration Review: Detention, alternatives to detention and deportation*, FMR44. <http://www.fmreview.org/1> September 2013
- , "Confronting Refugee Abuse in Indonesia's Detention Centers," 1 Juli 2013. Human Rights Watch. <http://m.hrw.org/news/2013/07/01/confronting-refugee-abuse-indonesia-s-detention-centers>.
- Antaranews.com "Bashar: Suriah bukan perang saudara, tetapi diserang al-Qaida," dalam www.antaranews.com, 19 September 2013.
- BBC Indonesia, "AS pastikan Suriah gunakan senjata kimia," 28 Agustus 2013,
- Bassam al-Khatib, "Mereka mau hancurkan Suriah, bukan sekadar tumbangkan Assad," dalam [Merdeka.com](http://www.merdeka.com) 24 September 2013.
- Cecily Hilleary. *Syrian Conflict a Public Health Disaster*. VOA. http://www.voanews.com/content/syrian_conflict_a_public_health_disaster/1516710.html
- Chris Huber dan Kathryn Reid, "Faqs: War in Syria, Children, and the Refugee Crisis," dalam www.worldvision.org diakses April 7, 2014
- Charlotte MsDonald-Gibson. *Syria conflict: Hundreds more desperate refugees could die at sea as Europe does little to help*. 15 Mei 2014. *The Independent*.
- Daniel Trilling. *The road to nowhere: the Syrian refugees left out in the cold by Europe*. Januari 2014. <http://www.newstatesman.com/2014/01/road-to-nowhere-syria>
- Deborah Amos dan Rima Marrouch, "With The Help Of Smugglers, Syrian Refugees Sneak Into Europe," Desember 2013. NPR.
- Douglas S. Massey et al., "Theories of International Migration: A Review and Appraisal". *Population and Development*

- Review 19, No. 3 (1993) dalam Christer Jönsson and Jonas Tallberg. *Institutional Theory in International Relations*. <https://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IIR.pdf>
- Dw.de, "Kepentingan Arab Saudi dalam Perang Suriah," dalam www.dw.de 24 Januari 2014.
- Encyclopaedia Britannica, "Syrian-Civil-War," dalam www.britannica.com, diakses tanggal 1 Juli 2014
- Gil Loescher, James Milner, Edward Newman, dan Gary Troeller, "Protracted refugee situations and the regional dynamics of peacebuilding," 2007.
- IRIN, "Analysis: Palestinian refugees from Syria feel abandoned," dalam *Humanitarian News and Analysis*, <http://www.irinnews.org/report/96202/analysis-palestinian-refugees-from-syria-feel-abandoned>
- Janet Cleveland, Cécile Rousseau, dan Rachel Kronick, "The harmful effects of detention and family separation on asylum seekers' mental health in the context of Bill C-31," dalam Brief submitted to the House of Commons Standing Committee on Citizenship and Immigration concerning Bill C-31, the Protecting Canada's Immigration System Act, 2012.
- Al-Jazeera, "Report: Over 11,000 Syrian Children Killed in War, Most by Explosives," 24 November 2013.
- , "UN: Syria death toll rises above 100,000," diakses 25 Juli 2013. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/2013725142157450141.html>
- , "Syrian refugees hit million mark in Lebanon," 3 April 2014. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/syrian-refugees-hit-million-mark-lebanon-201443792523131.html>
- Kate Jastram dan Marilyn Achiron. *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*. UNHCR dan IPU. http://www.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf
- Michael Boyce, "Beyond Emergency Assistance: Syrian Refugees in Northern Iraq and Jordan," Februari 2014. *Refugees international*. <https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=4335>
- Missy Ryan, "Syria refugee crisis poses major threat to Lebanese stability," 27 Maret 2014. *Reuters*. <http://www.reuters.com/article/2014/03/28/us-lebanon-usa-idUSBREA2R02E20140328>
- Muhammad Fakhry Ghafur, "Membaca Konflik Suriah," dalam www.politik.lipi.go.id, diakses 31 Agustus 2012.
- Patrick Maigua, "New refugee camp in Jordan as more Syrian refugees flee conflict," *United Nations, Geneva*. <http://www.unmultimedia.org/radio/english/2014/03/new-refugee-camp-in-jordan-as-more-syrian-refugees-flee-conflict-and-violence/#.U0yayScaySM>
- Refworld, "Lebanon: Treatment of Palestinian refugees, including information on identity documents, mobility rights, property rights, access to social services, education and employment, and living conditions." 15 November 2011. *Immigration and Refugee Board of Canada*. <http://www.refworld.org/docid/507553bd2.html>.
- Sarah Meyer. *The 'refugee aid and development' approach in Uganda: empowerment and self-reliance of refugees in practice*. University of Oxford, United Kingdom. 2006.
- Sarah Collinson. *UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Globalization and the dynamics of international migration: implications for the refugee regime*, May 1999, ISSN 1020-7473, available at: <http://www.refworld.org/docid/4ff59b852.html> [accessed 20 June 2014]
- UN Agency, "Number of Syrian refugees tops 2 million, with 'more on the way,'" 3 September 2013. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45757#.U0yVMicayK0>

- UNHCR, "Finding a New Home," <http://www.dw.de/finding-a-new-home/g-17482440>
- UNHCR, "Syria Regional Response Plan-Iraq," <http://www.unhcr.org/syriarrp6/docs/syria-rrp6-iraq-response-plan.pdf>
- UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, "Briefing: The Mounting Syrian Refugee Crisis," 20 Agustus 2012. <http://www.irinnews.org/report/96136/briefing-the-mounting-syrian-refugee-crisis>
- UNHCR, "UNHCR country operations profile-Lebanon." <http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html>
- UNHCR, "What is a Refugee," http://www.unrefugees.org/site/c.lfIQKSOwFqG/b.4950731/k.A894/What_is_a_refugee.htm
- UNHCR, "The Refugee Convention 1951," <http://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>.
- Voa-Islam, "Diskusi terbuka: inilah pandangan Joserizal tentang konflik Suriah." dalam www.voa-islam.com 27 Juni 2013.
- www.middleeastmonitor.com, "Morocco and Algeria trade accusations over deporting refugees," 29 Januari 2014.